

**MEMAHAMI MAKNA PEMBANGUNAN EKONOMI
DI NEGARA SEDANG BERKEMBANG
(Refleksi Pembangunan Ekonomi Indonesia Masa Orde Baru)**

Oleh :
Drs.Dadang Dahlan,M.Pd

PENDAHULUAN

Ada tiga istilah yang sering digunakan untuk arti yang bersamaan, yakni pembangunan ekonomi, perkembangan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi. Sesungguhnya pembangunan ekonomi memiliki arti yang lebih luas, sebab mencakup perkembangan ekonomi maupun pertumbuhan ekonomi. Namun, kebanyakan penulis sering menggunakan secara bergantian dengan makna yang sama. Pertumbuhan ekonomi lazimnya didefinisikan sebagai “ suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang ” (Sukirno,1981:13). Definisi ini memiliki tiga unsur : (1) suatu proses, yang berarti merupakan perubahan yang terus menerus, (2) usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita, (3) kenaikan pendapatan perkapita tersebut berlangsung dalam jangka panjang.

Definisi tersebut bertahan cukup lama sejak kelahiran Ilmu Ekonomi Pembangunan sebagai cabang Ilmu Ekonomi yang mulai dikembangkan setelah Perang Dunia II. Ekonomi Pembangunan bertujuan menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara sedang berkembang dan menemukan cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, supaya negara-negara sedang berkembang dapat membangun ekonominya lebih cepat lagi.

Kenyataan menunjukkan bahwa kenaikan pendapatan per kapita belum bisa memecahkan masalah-masalah pokok negara sedang berkembang yang pada umumnya terperangkap dalam keterbelakangan/kemiskinan. Jika pendapatan per kapita naik, tetapi jumlah penduduk miskin tidak berkurang dan bahkan bertambah, maka ada sesuatu yang tidak beres mengenai distribusi pendapatan. Artinya, terdapat jurang antara yang kaya dengan yang miskin, dimana sebagian besar pendapatan diambil oleh sebagian kecil orang.

Atas dasar kenyataan demikian, maka pada dekade 1970-an, telah dilakukan redefinisi pertumbuhan ekonomi. Pembangunan atau pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai “ proses pengurangan atau penghapusan kemiskinan, kepincangan distribusi pendapatan dan pengangguran ” atau “ *the reduction or elimination of poverty, inequality and unemployment within the context of a growing economy* ” (Partadiredja, 1993: 212). Kemudian sejak terjadinya krisis energi tahun 1973, timbul gagasan untuk memasukkan unsur **percaya diri** atau **berdiri di atas kaki sendiri** ke dalam pengertian pembangunan. Berdiri di atas kaki sendiri (*self reliance*) berarti pengurangan ketergantungan pada kebutuhan pokok yang di impor, meliputi bahan makanan, minyak bumi, modal dan keahlian.

Dengan demikian setiap proses pertumbuhan ekonomi harus mengandung unsur-unsur : (1) peningkatan pendapatan nasional, (2) peningkatan pendapatan per kapita, (3) pemberantasan kemiskinan, (4) pemerataan pendapatan, (5) pemberantasan pengangguran, (6) pengurangan ketergantungan pada bahan pokok yang diimport.

KARAKTERISTIK NEGARA SEDANG BERKEMBANG

Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa fokus pembahasan dari analisa ekonomi pembangunan adalah masalah pembangunan di negara-negara sedang berkembang (*developing countries*). Negara sedang berkembang memiliki karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut.

a. Taraf hidup yang rendah

Pada umumnya sebagian besar penduduk di negara sedang berkembang taraf hidupnya rendah, yang dapat dilihat dari tingkat pendapatan yang rendah, perumahan yang tidak memenuhi syarat, kesehatan dan gizi yang buruk, tingkat pendidikan yang rendah, tingkat kematian bayi yang tinggi, dan tingkat harapan hidup yang pendek.

b. Produktivitas yang rendah

Rendahnya produktivitas (kemampuan berproduksi) tenaga kerja antara lain disebabkan buruknya kesehatan, tingkat gizi yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah, kurang disiplin, kurangnya peralatan. Rendahnya produktivitas ini mengakibatkan lambatnya laju pembangunan.

c. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi

Pada umumnya negara yang sedang berkembang mengalami laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, yakni sekitar 2,5 % per tahun. Pertumbuhan penduduk yang tinggi ini menimbulkan akibat yang negatif terhadap pembangunan, yakni pengangguran yang berlebihan, tingkat pendapatan per kapita yang rendah.

d. Tingkat pengangguran yang tinggi

Tingkat pengangguran yang tinggi di negara-negara sedang berkembang dapat dicari sebabnya pada permintaan dan penawaran tenaga kerja. Dari sisi permintaan, permintaan tenaga kerja ini tidak berjalan secepat pertumbuhan ekonomi. Kelambatan

permintaan akan tenaga kerja ini disebabkan proyek pembangunan, terutama di sektor industri bersifat padat modal yang kurang menyerap tenaga kerja. Dari segi penawaran, mutu dan kualifikasi tenaga kerja seringkali tidak memenuhi keperluan pembangunan. Tenaga kerja ini umumnya tidak terdidik, tidak terlatih dan tidak terampil.

e. Memiliki sumber-sumber alam yang belum banyak diolah

Di negara-negara sedang berkembang, sumber-sumber alam belum banyak diolah, sehingga masih bersifat potensial. Hal ini disebabkan kekurangan modal, tenaga ahli dan entrepreneur.

f. Kekurangan modal

Dalam hal pembentukan modal, negara sedang berkembang mengalami lingkaran yang tidak berujung pangkal (*vicious circle*), baik dari segi penawaran maupun dari segi permintaan. Penawaran modal dipengaruhi kesanggupan untuk menabung, sedangkan permintaan modal dipengaruhi oleh daya tarik untuk menanam modal (investasi).

Dari segi penawaran, terdapat kemampuan yang rendah untuk menabung, sebagai akibat dari tingkat pendapatan yang rendah. Tingkat pendapatan yang rendah ini disebabkan oleh produktivitas yang rendah. Produktivitas yang rendah ini sebagai akibat dari kekurangan modal. Kekurangan modal merupakan akibat dari rendahnya kemampuan untuk menabung.

Dari segi permintaan, terdapat dorongan yang rendah untuk menanam modal. Hal ini disebabkan daya beli masyarakat yang rendah. Daya beli masyarakat yang rendah disebabkan oleh pendapatan masyarakat yang rendah. Pendapatan yang rendah ini sebagai akibat dari produktivitas yang rendah. Produktivitas yang rendah disebabkan oleh

penanaman modal yang rendah. Penanaman modal yang rendah ini sebagai akibat daripada dorongan untuk menanam modal yang rendah pula.

Pembangunan/pertumbuhan ekonomi menggambarkan upaya suatu bangsa atau negara dalam meningkatkan kemakmuran mereka dalam bentuk meningkatnya produksi barang dan jasa. Besarnya produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dinamakan produksi nasional atau pendapatan nasional. Semakin besar kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa, makin banyak pula kebutuhan-kebutuhan material yang dapat dipenuhi.

Menurut Michael P. Todaro, tujuan pembangunan yang universal adalah sebagai berikut.

- a. Menambah persediaan dan memperluas distribusi barang keperluan hidup yang pokok seperti makanan, pakaian, perumahan, kesehatan dan perlindungan bagi semua anggota masyarakat.
- b. Menaikkan taraf hidup, termasuk pendapatan yang lebih tinggi, penyediaan lapangan kerja, pendidikan dan perhatian yang lebih banyak pada nilai-nilai kebudayaan dan kemanusiaan. Semua ini tidak hanya akan menaikkan kesejahteraan kebendaan saja, tetapi juga akan menimbulkan harga diri dan kebanggaan nasional.
- c. Memperluas lingkup pilihan ekonomi dan sosial bagi perseorangan dan negara dengan membebaskan mereka dari perbudakan dan ketergantungan, tidak hanya dalam hubungannya dengan orang-orang dan negara-negara lain, tetapi juga dengan kebodohan dan kemiskinan.

TEORI-TEORI PERTUMBUHAN EKONOMI

Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor, yakni faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Faktor ekonomi terdiri dari : ketersediaan sumber

alam, kuantitas dan kualitas SDA, modal dan teknologi. Faktor non-ekonomi antara lain sosial budaya, dan kondisi politik.

Dengan demikian pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh banyak faktor yang kompleks. Jhon Vaizey (1988:32), mengatakan “ secara singkat faktor-faktor ini dapat dikategorikan dalam pertumbuhan tenaga kerja, akumulasi modal dan fisik dan penambahan pada persediaan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat ” Dalam pernyataan Vaizey tersebut, tersurat secara jelas peranan yang diberikan pendidikan, yakni penambahan pada persediaan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat.

Sementara itu Baurer (dalam Jhingan,1996:85) berdasarkan hasil penelitiannya, menyimpulkan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi itu adalah “ bakat, kemampuan, kualitas, kapasitas dan kecakapan, sikap, adat-istiadat, motivasi, serta struktur politik.

Dari pendapat Vaizey dan Baurer tersebut, kita dapat melihat betapa “pendidikan” berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sebab persediaan pengetahuan dan keterampilan sebagaimana yang disebutkan Vaizey, dan kemampuan, kualitas, kapasitas dan kecakapan, sikap, sebagaimana yang disebutkan Baurer, semuanya dipengaruhi oleh pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-formal. Bahkan adat istiadat pun dapat dirubah melalui pendidikan. Lebih lanjut Vaizey (1988:33), mengatakan “ di negara-negara dengan tingkat pendidikan formal yang tinggi, ada suatu kesediaan untuk menerima perubahan dan kesediaan untuk mengembangkan perubahan tersebut ”. Hal ini sangat diperlukan dalam pertumbuhan ekonomi.

Seperti dikemukakan Gary S. Becker (1993:323) dalam bukunya “ Human Capital ”, pertumbuhan ekonomi merupakan tantangan intelektual sejak permulaan munculnya analisis ekonomi yang sistematis. Bahkan Adam Smith yang dikenal sebagai Bapak Ilmu Ekonomi, telah mengklaim bahwa pertumbuhan ekonomi sangat berkaitan dengan pembagian kerja (*division labor*). Pembagian kerja merupakan titik tolak dari teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith, yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Kenaikan produktivitas tenaga kerja ini berkaitan dengan : (1) meningkatnya keterampilan pekerja, (2) penghematan waktu dalam memproduksi barang, dan (3) penemuan mesin yang sangat menghemat tenaga. Penyebab yang ketiga ini bukan berasal dari tenaga kerja tetapi dari modal. Dalam hal ini teknologi telah melahirkan pembagian kerja dan perluasan pasar.

Di samping pembagian kerja, Adam Smith menekankan pentingnya memupukan modal, bahkan pemupukan modal ini harus dilakukan lebih dahulu daripada pembagian kerja. Ia menganggap pemupukan modal sebagai suatu syarat mutlak bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian permasalahan pertumbuhan ekonomi secara luas adalah kemampuan manusia untuk lebih banyak menabung dan kemudian menginvestasikannya.

Selain teori Adam Smith, Becker (1993:323), menunjukkan pula bahwa Thomas Malthus telah mengembangkan suatu model formal mengenai proses pertumbuhan yang dinamis. Malthus tidak menganggap proses pertumbuhan ekonomi terjadi dengan sendirinya, bahkan proses pertumbuhan ekonomi memerlukan berbagai usaha yang konsisten dari pihak rakyat (Jhingan,1996:121).

Menurut Malthus, pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagian bergantung pada kuantitas produk yang dihasilkan oleh tenaga kerjanya, dan sebagian lagi pada nilai atas

kuantitas produk yang dihasilkan oleh tenaga kerjanya, dan sebagian lagi pada nilai atas produk tersebut. Dalam kaitannya dengan pertumbuhan penduduk, Malthus mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk tidak bisa terjadi tanpa peningkatan kesejahteraan yang sebanding. Jika tingkat akumulasi modal meningkat, permintaan akan tenaga kerja juga meningkat. Akan tetapi pertumbuhan penduduk saja tidak akan meningkatkan kesejahteraan. Pertumbuhan penduduk akan meningkatkan kesejahteraan bila pertumbuhan tersebut meningkatkan permintaan efektif (*effective demand*). Peningkatan pada permintaan efektif akan menyebabkan meningkatnya kesejahteraan.

Teori-teori yang telah disebutkan (Adam Smith maupun Malthus), dikategorikan teori klasik. Sejak munculnya pemikiran baru dari tokoh ekonomi Jhon M. Keynes dengan judul bukunya “ The General Theory of Employment, Interest and Money ” yang terbit pada tahun 1936 muncullah apa yang disebut aliran “ Keynesian ”. sebenarnya Keynes sendiri tidak melahirkan analisis ekonomi bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang, sebab perhatiannya terpusat pada keadaan jangka pendek yang tengah dihadapi dunia pada waktu itu yaitu keadaan depresi dan pengangguran.

Salah satu teori dari aliran Keynesian adalah teori Harrod Domar (Bintoro Tjokroamidjojo, 1984:35). Menurut Harrod Domar, pembentukan modal dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kesanggupan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang, sekaligus juga sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Penanaman modal yang dilakukan masyarakat dalam suatu waktu tertentu akan digunakan untuk dua tujuan : (1) mengganti alat-alat modal yang tidak dapat dipergunakan lagi, (2) untuk memperbanyak jumlah alat-alat modal dalam masyarakat.

Setelah aliran Keynesian, kemudian muncul aliran Neo Klasik. Apabila di dalam teori Harrod Domar dikemukakan bahwa tingkat pengeluaran akan menentukan laju pertumbuhan ekonomi, maka dalam aliran Neo Klasik dinyatakan bahwa hal tersebut tidak akan menentukan laju pertumbuhan. Menurut aliran Neo Klasik, laju pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh penambahan dalam penawaran faktor-faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi. Teori ini berpangkal pada asumsi “ perekonomian akan tetap mengalami tingkat kesempatan kerja penuh dan kapasitas alat-alat modal akan tetap sepenuhnya digunakan dari masa ke masa “ (Bintoro Tjokroamidjojo,1984:36).

Dari keseluruhan teori pertumbuhan ekonomi yang telah dipaparkan, semuanya menekankan pentingnya pembentukan modal/investasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Roe L.Jhons dan Edgar L.Morphet (1975:92), yang mengatakan “ *the economi of a country is developed through the formation of capital* ”. Dengan demikian, pembentukan modal merupakan salah satu syarat penting dalam pertumbuhan ekonomi.

PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA

Pembangunan ekonomi di Indonesia dilaksanakan dalam kerangka pembangunan nasional yang menganut prinsip kesemestaan, artinya pembangunan bersifat komprehensif mencakup seluruh segi kehidupan masyarakat.

Pada masa Orde Baru, pembangunan nasional dilaksanakan secara bertahap dalam jangka panjang yang dimulai sejak 1 April 1969. Program pembangunan jangka panjang ini dibagi-bagi menjadi tahapan-tahapan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Jika tidak terjadi perubahan sistem pemerintahan, saat ini Indonesia berada dalam era Pembangunan Jangka Panjang Tahap kedua, dalam kurun waktu 1994 – 2019.

Bila data-data statistik pada masa Orde Baru dapat dipercaya, maka pertumbuhan ekonomi pada era PJPT I dapat dikatakan berhasil. Jika pada awal PJPT I (tahun 1969), pendapatan per kapita penduduk Indonesia hanya US \$ 70, maka pada akhir PJPT I (tahun 1993) sudah mencapai US \$ 700, bahkan pada tahun 1997 sebelum terjadi krisis ekonomi sudah mencapai angka US \$ 1300. Hal ini merupakan keberhasilan yang cukup fantastis, sehingga Indonesia digolongkan negara “ *High Performing Asian Economics* ”, menyertai negara-negara lainnya di Asia seperti Jepang, China, Hongkong, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, Thailand.

Jika dilihat dari angka-angka Produk Domestik Bruto (PDB), pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang periode 25 tahun (PJPT I), tergolong ekonomi tinggi (Dumairy,1997:40). Pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu tersebut rata-rata sebesar 6.8 % per tahun. Kunci keberhasilan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut adalah “ investasi yang tinggi melebihi investasi rata-rata negara di dunia ”. Selain investasi asing, investasi dalam negeri ternyata lebih besar, berkat adanya kredit perbankan.

Lebih lanjut Dawam Raharjo (1996:3-4) menuturkan bahwa selain investasi yang tinggi faktor yang turut menentukan keberhasilan pertumbuhan ekonomi selama PJPT I itu meliputi : (1) tersedianya prasarana fisik berkat pembangunan, jalan, jembatan, bendungan, irigasi pengolahan lahan pertanian, pabrik-pabrik dan gedung-gedung yang mewadahi lembaga-lembaga ekonomi ; (2) meningkatnya mutu SDM karena pembangunan pendidikan. Sekalipun tidak menjadi prioritas sejalan Pelita I sampai V, namun anggaran pendidikan berada dalam urutan 5 atau ke 4 dari besarnya anggaran sektoral.

Menurut Dawam Rahardjo (1996:4), selain pendidikan formal, pendidikan non-formal pun turut menentukan peningkatan kualitas SDM pada masa PJPT I. Berbagai latihan telah dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pegawai negeri, manajer KUD, pengrajin, wanita dan pemuda, yang dilakukan oleh berbagai departemen. Demikian pula tidak kurang pentingnya pendidikan dalam bentuk penyuluhan, misalnya melalui program BIMAS kepada petani dan penyuluhan kepada pengrajin industri kecil dan kerajinan rumah tangga. Sementara itu, di lingkungan perusahaan, peningkatan SDM, terutama bersumber pada lulusan pendidikan formal. Pada masa PJPT I, lulusan perguruan tinggi meningkat pesat baik lulusan universitas maupun akademi, walaupun pada kenyataannya masih terdapat “ *mis-match* ”. Namun hasil pendidikan umum di perguruan tinggi tersebut bisa fleksibel, karena adanya berbagai pelatihan yang diselenggarakan oleh berbagai departemen dan perusahaan-perusahaan swasta.

Kelemahan yang sangat mendasar dalam pembangunan pada era PJPT I adalah terabaikannya aspek pemerataan atau keadilan ekonomi. Menurut Dumairy (1997), pada waktu PJPT I dirancang, strategi pembangunan Indonesia bertumpu pada aspek pertumbuhan. Sasaran pembangunan diarahkan pada untuk pencapaian pertumbuhan yang tinggi dengan prinsip efisiensi sebagai basis pijakannya. Sekalipun aspek pemerataan ini sempat diperhatikan, yakni mulai Pelita III, namun inti tumpuan pembangunan tetap saja pada pertumbuhan dan bukan pemerataan. Karena pertumbuhan senantiasa menjadi tumpuan pembangunan, maka tidak mengherankan jika aspek pemerataan atau keadilan menjadi terabaikan.

Lebih lanjut Dumairy menjelaskan bahwa ditumpukannya strategi pembangunan pada aspek pertumbuhan, bukanlah tanpa alasan. Secara akademik, strategi pertumbuhan

telah memiliki teori-teori yang mantap dalam konsep pembangunan ekonomi. Sementara itu, gagasan-gagasan mengenai pemerataan masih bersifat embrional, belum memiliki kerangka analisis yang mantap dan mapan seperti halnya teori-teori pertumbuhan. Atas dasar itu, tidak mengherankan jika para perencana pembangunan, lebih memusatkan rancangan pembangunannya pada aspek pertumbuhan.

Selain itu, menurut Sritua Arief (1988), pelaksanaan suatu strategi pertumbuhan dan pemerataan (redistribusi) hanya akan efektif bilamana 2 syarat pokok ini bisa dipenuhi :

1. Pembentukan administrasi pemerintahan yang bersih, efektif dan berdisiplin pada seluruh tingkat birokrasi pemerintahan.
2. Restrukturisasi masyarakat Indonesia untuk menghilangkan struktur-struktur sosial yang menghimpit massa rakyat.

Kedua syarat pokok tersebut sampai sekarang belum bisa dipenuhi, sehingga mengakibatkan program-program pemerataan tidak efektif. Sekedar gambaran, Sritua Arief (1988), mengemukakan hasil penelitian J. Danny Zacharias tentang pelaksanaan program-program pembangunan seperti BIMAS, Proyek Padat karya dan Subsidi Desa. Hasil penelitian tersebut memberikan gambaran :

1. Para Lurah dan kelompoknya yaitu para pamong desa adalah pihak-pihak yang sebagian besar menguasai fasilitas BIMAS.
2. Di dalam pelaksanaan padat karya, yakni proyek penyediaan kesempatan kerja kepada buruh tani di daerah minus pada musim kemarau, Lurah yang berfungsi sebagai pengawas, dalam kenyataannya tidak memberikan pekerjaan kepada golongan buruh tani, tetapi banyak pekerjaan diberikan kepada orang-orang dari

kelompoknya. Pemotongan-pemotongan pembayaran terhadap buruh tani oleh Lurah bekerjasama dengan Camat adalah merupakan kenyataan di desa-desa.

3. Subsidi desa yang bertujuan untuk memperbaiki sarana produksi, pemasaran dan perhubungan banyak dimanfaatkan oleh Lurah dan kelompoknya.
4. Sebelum program pembangunan memasuki desa, Lurah dan keluarganya atau kelompoknya, telah tumbuh sebagai suatu kelompok kuat, baik secara ekonomi, sosial maupun politik. Kedudukan ini diperkuat lagi dengan program-program pembangunan yang memasuki desa melalui Lurah. Hal ini telah menyebabkan manfaat-manfaat kesempatan kerja dan peningkatan produksi petani sebagian besar dinikmati oleh Lurah dan kelompoknya.

Sritua Arief (1988), telah menunjukkan pula bahwa dalam proses pertumbuhan ekonomi diwarnai oleh pola tingkah laku penguasa dan keseluruhan birokrasi pemerintah yang tidak wajar, sehingga menimbulkan distorsi-distorsi dalam jalannya proses ekonomi. Distorsi-distorsi tersebut antara lain :

1. Penghisapan parasitis atas sumber-sumber nasional oleh pihak-pihak dari sentrum kekuasaan dan dari keseluruhan birokrasi pemerintah dan perusahaan-perusahaan negara. Penghisapan parasitis atas sumber-sumber nasional ini, ditanggung oleh sebagian besar massa rakyat. Pungutan-pungutan yang tak wajar dan memberatkan, menimbulkan beban yang tidak wajar kepada unit-unit ekonomi yang dikenai pungutan-pungutan ini. Kemudian pungutan-pungutan yang tidak wajar ini oleh unit-unit ekonomi terpaksa dibebankan kepada konsumen barang dan jasa, yang mengakibatkan harga barang dan jasa menjadi lebih mahal dari yang seharusnya.

2. Proses monopolisasi kesempatan dan fasilitas oleh kelompok-kelompok pengusaha swasta yang bekerjasama dengan orang-orang dari pusat kekuasaan dan birokrasi pemerintah. Fenomena ini kemudian ,menimbulkan pemberian dispensasi dan hak-hak istimewa tertentu bagi perusahaan-perusahaan yang terbentuk atas hasil kerjasama ini,sehingga persaingan menjadi tidak sehat. Monopoli fasilitas dan kesempatan ini telah mengakibatkan proses manfaat ekonomi jatuh kepada segelintir orang saja.

DAFTAR PUSTAKA

Arief,Sritua,1988. *Indonesia : Pertumbuhan Ekonomi,Disparitas Pendapatan dan Kemiskinan Massal*, Jakarta : Lembaga Studi Pembangunan

Becker,Gary S (1993) *Human Capital*, Chicago : The University of Chicago Press

Dumairy, 1997. *Perekonomian Indonesia*, Jakarta : Erlangga

Jhingan,M.L, 1996. *Ekonomi Pembangunan*,Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Partadiredja, Ace,1993. *Pengantar Ekonomika*, Yogyakarta : BPFE

Rahardjo, Dawam,1996. *Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi*, Makalah pada Seminar Nasional Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.

Sukirno,Sadono,1981. *Ekonomi Pembangunan*, Medan : Borta Gorat

Tjokroamidjojo, Bintoro,1984. *Teori & Strategi Pembangunan Nasional*, Jakarta : Gunung Agung

Vaizey,Jhon,1988. *Pendidikan di Dunia Modern*, Jakarta : Gunung Agung

TUGAS MANDIRI

Setelah mempelajari modul 7 tentang pembangunan/pertumbuhan ekonomi, kerjakanlah soal-soal berikut ini.

1. Mengapa GNP per kapita sebagai ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi seringkali menyesatkan ? Jelaskan !
2. Mengapa program-program pemerintah Indonesia yang ditujukan untuk masyarakat miskin dalam rangka pemerataan pendapatan seringkali tidak efektif. Jelaskan dan berikan contoh kasusnya di lingkungan saudara !

MODUL 8

KONSUMSI, TABUNGAN DAN INVESTASI

Setelah mempelajari modul 8 ini diharapkan dapat memahami kegiatan menggunakan (konsumsi), dan secara khusus diharapkan dapat :

1. Mendefinisikan konsumsi
2. Menjelaskan cara mengatur ekonomi rumah tangga
3. Menjelaskan pentingnya tabungan
4. Menjelaskan pentingnya investasi

A. Pengertian Konsumsi

Seperti telah dijelaskan dimuka (modul 3) bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan dalam kehidupan dapat dibedakan menjadi tiga yakni, konsumsi, produksi dan distribusi. Dari ketiga kegiatan itu, kegiatan konsumsi dilakukan oleh Rumah Tangga Konsumsi atau konsumen sebagai pelaku ekonomi.

Rumah Tangga Konsumsi adalah manusia secara individual atau manusia sebagai anggota masyarakat atau keluarga yang melakukan kegiatan konsumsi. Dalam hal ini yang dimaksud konsumsi adalah tindakan dalam mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang, baik secara sekaligus maupun bertahap. Sebagai contoh, memakan pisang berarti menghabiskan kegunaan pisang. Setiap kali siswa duduk di bangku sekolah, ia melakukan tindakan konsumsi, sebab bangku tersebut berangsur-angsur berkurang kegunaannya, sampai akhirnya rusak. Demikian pula konsumsi terjadi pada barang modal seperti halnya mesin di pabrik yang sering digunakan berulang kali sehingga menjadi aus dan rusak (terjadi penyusutan).

Tindakan konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga yang satu dengan rumah tangga yang lainnya bisa berbeda-beda. Hal ini tergantung pada gaya hidupnya, lingkungannya dan tingkat pendapatannya. Gaya hidup yang boros, lingkungan yang

konsumtif, akan mempengaruhi pola konsumsinya. Demikian pula tingkat pendapatan, berapa besar bagian dari pendapatan yang digunakan untuk konsumsi, sangat tergantung pada jumlah pendapatan yang bisa diperoleh. Sehubungan dengan hal ini, Engel, seorang ahli ekonomi Jerman, mengemukakan hubungan antara pendapatan dan konsumsi sebagai berikut “ **semakin kecil pendapatan, semakin besar bagian dari pendapatan itu yang digunakan untuk konsumsi dan sebaliknya** ”. Karena itu pokok permasalahan yang dihadapi oleh setiap rumah tangga konsumsi adalah bagaimana mengusahakan agar dengan pendapatan yang diperoleh dapat memenuhi semua kebutuhannya. Dengan kata lain bagaimana cara menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran.

B. Mengatur Ekonomi Rumah Tangga

Pengolahan konsumsi yang realistis, pada dasarnya berkaitan dengan cara bertindak ekonomis yaitu sikap hemat, berencana, bersedia mengubah sikap boros.

Dalam rangka mengelola ekonomi rumah tangga kita harus berupaya agar :

1. Mampu mengatur pengeluaran sesuai dengan kondisi keuangan dan rencana yang telah disusun.
2. Mampu mengadakan pilihan atau seleksi kebutuhan-kebutuhan kita sesuai dengan intensitasnya.
3. Mampu mengadakan tabungan (saving) untuk merealisasikan kebutuhan-kebutuhan yang direncanakan.
4. Mampu mengatur keuangan sedemikian rupa sehingga tidak berutang, kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah :

1. Membentuk catatan tentang semua pengeluaran dan penerimaan. Inilah langkah

pertama dalam mengatur keuangan keluarga, yakni membuat catatan tentang semua pengeluaran dan penerimaan uang dengan lengkap. Pengeluaran dapat dirinci untuk berbagai keperluan seperti belanja dapur, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, rekreasi, dan sebagainya.

2. Menyusun anggaran belanja rumah tangga. Berdasarkan catatan tersebut diatas, kita dapat menyusun anggaran belanja keluarga, yakni suatu rencana yang disusun secara rinci mengenai penghasilan dan pengeluaran untuk kebutuhan-kebutuhan rumah tangga dalam waktu tertentu, misalnya satu bulan. Dalam hal ini yang yang perlu diperhatikan adalah :

- a. Membuat perhitungan /taksiran jumlah penerimaan dalam bulan yang akan datang
- b. Membuat daftar kebutuhan untuk satu bulan
- c. Memperkirakan harga-harga kebutuhan masing-masing
- d. Membandingkan antara penghasilan yang sebenarnya dengan pengeluaran yang sebenarnya
- e. Melihat hasil perbandingan pada akhir bulan, mana pos-pos yang perlu ditambah atau dikurangi.

3. Membuat kebijaksanaan dalam pengeluaran uang

Kita harus selalu menjaga keseimbangan antara pengeluaran dengan penghasilan. Bila pengeluaran lebih besar daripada penghasilan, maka harus ada pos-pos pengeluaran yang ditekan/dikurangi sehingga bisa sesuai dengan pendapatan. Dengan kata lain, kita harus mengadakan seleksi terhadap kebutuhan, mana yang pokok, mana yang kurang penting dan ditunda, mana yang bisa dikurangi atau diganti dengan barang lain yang lebih murah.

4. Mengusahakan tambahan penghasilan

C. Tabungan (Saving)

Seperti telah disinggung di atas, untuk menghadapi pemuasan kebutuhan di masa yang akan datang, kita harus merencanakannya dari sekarang dengan jalan menyisihkan sebagian dari pendapatan untuk tidak dikonsumsi. Bagian pendapatan yang tidak dikonsumsi ini disebut tabungan atau saving. Namun, tidak semua bagian pendapatan yang tidak dikonsumsi dapat digolongkan sebagai tabungan, sebab motif untuk menabung adalah untuk mengadakan investasi. Dengan demikian, menyimpan sejumlah uang di rumah dalam “ celengan “ dengan tujuan untuk membeli barang dan jasa di masa yang akan datang, tidak dapat digolongkan sebagai tabungan. Dalam ilmu ekonomi simpanan yang demikian disebut “ hoarding “. Demikian pula membeli perhiasan mas dengan tujuan untuk dijual kembali bilamana memerlukan uang, tindakan ini digolongkan sebagai “ hoarding “

Simpanan dalam bentuk “ hoarding “ sebagaimana dicontohkan di atas, memang bermanfaat bagi mereka yang melakukannya. Namun, tidak bermanfaat bagi masyarakat luas, terutama investor. Lain halnya, jika masyarakat menyimpan bagian pendapatan yang tidak dikonsumsi tersebut di Bank, yang kemudian oleh Bank disalurkan dalam bentuk kredit kepada para investor. Simpanan masyarakat ini sangat bermanfaat bagi pembentukan modal yang akan digunakan oleh para investor. Bentuk simpanan seperti inilah yang disebut sebagai tabungan (saving).

D. Investasi

Investasi atau penanaman modal adalah tambahan barang-barang modal atau barang-barang produksi (mesin, pabrik, dsb.) dalam suatu masa tertentu. Investasi ini dapat tercipta bilamana ada tabungan.

Besar kecilnya investasi yang dilakukan oleh pengusaha dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini.

a. Tingkat bunga

Dalam hal ini meskipun seorang pengusaha memiliki modal yang cukup besar, belum tentu ia melakukan kegiatan investasi. Sebab keputusan pengusaha untuk mengadakan investasi dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Jika tingkat suku bunga lebih tinggi dari tingkat keuntungan yang akan diperolehnya, maka pengusaha tersebut akan memilih menyimpan uangnya di bank daripada melakukan investasi. Sebaliknya, jika tingkat suku bunga lebih rendah daripada tingkat keuntungan yang akan diperolehnya, maka pengusaha tersebut akan memilih investasi. Demikian pula pengusaha tersebut akan memiliki keberanian untuk memperoleh kredit bank untuk menambah modal usahanya, jika keuntungan yang akan diperoleh lebih besar daripada bunga yang harus dibayarnya kepada bank.

b. Tingkat keuntungan

Investasi yang dilakukan oleh pihak swasta memiliki motif untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Karena itu, keuntungan yang diperoleh merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi investasi. Keuntungan yang tinggi merupakan suatu petunjuk bahwa perusahaan tersebut sedang mengalami perkembangan dalam permintaan produknya. Agar permintaan yang berkembang itu dapat dipenuhi di

masa yang akan datang, maka investasi baru harus dilakukan antara lain menambah mesin-mesin, mendirikan pabrik baru, dsb.

c. Prediksi (ramalan) tentang masa depan

Suatu ramalan atau prediksi tentang keadaan di masa depan, apakah perekonomian akan semakin membaik atau bahkan terdapat tanda-tanda kemunduran, akan mempengaruhi keputusan investasi. Ramalan yang menunjukkan bahwa keadaan perekonomian akan lebih baik di masa mendatang, akan mendorong pertumbuhan investasi.

Ditinjau dari siapa yang mengadakan investasi, dapat dibedakan dua jenis investasi sebagai berikut.

a. Investasi Swasta (Private Investment)

Investasi ini dilakukan oleh pihak swasta dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Investasi ini biasanya didorong oleh meningkatnya daya beli masyarakat.

b. Investasi Pemerintah (Public Investment)

Investasi pemerintah dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan bukan untuk memperoleh keuntungan. Investasi ini dalam bentuk pembangunan jalan raya, pelabuhan, irigasi, rumah sakit, dsb.

Selain bentuk investasi fisik sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sesungguhnya masih ada bentuk investasi lain seperti investasi sumber daya manusia (human investment), seperti program pendidikan dan pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Para ahli ekonomi telah mengakui pentingnya investasi sumber daya manusia ini, sebab memiliki sumbangan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

TUGAS MANDIRI

Setelah mempelajari modul 8 tentang konsumsi, tabungan dan investasi, kerjakanlah soal-soal berikut ini.

1. Adakah persamaan dan perbedaan antara tabungan dengan hoarding ? Jelaskan !
2. Di negara sedang berkembang, pembentukan modal melalui tabungan relatif sulit dilakukan. Mengapa ?

DAFTAR PUSTAKA (MODUL 5 – 8)

Abdullah,N.S.1987. **Pengantar Ilmu Ekonomi**, Bandung : Forum Pengkajian & Pengembangan Pendidikan Ekonomi, FPIPS IKIP Bandung.

Ace Partadiredja.1982. **Pengantar Ekonomika**, Yogyakarta : BPFE

Becker, Gary.S.1993.**Human Capital**, The University Chicago Press

Bintoro Tjokroamidjojo.1984.**Teori & Strategi Pembangunan Nasional**, Jakarta : Gunung Agung.

Carla Poli.1992. **Pengantar Ilmu Ekonomi I**, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Dawam Rahardjo.1996.**Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi**. Makalah pada Seminar Nasional Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.

Dumairy.1997. **Perekonomian Indonesia**, Jakarta : Erlangga.

Jhingan,M.L.1996. **Ekonomi Pembangunan**, Jakarta : Grafindo Persada

Sadono Sukirno.1981.**Ekonomi Pembangunan**, Medan : Borta Gorat

Sritua Arief.1978. Indonesia : **Pertumbuhan Ekonomi, Disparitas Pendapatan dan Kemiskinan Massal**, Jakarta : Lembaga Studi Pembangunan.

Winardi.1976.**Pengantar Teori Politik Ekonomi**, Bandung : Alumni

